



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEWI CHOMISTRIANA
2. Jabatan : SEKRETARIS BADAN
3. NHK : 503093

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	6.152.000.000
1. Tanah Seluas 481 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 5.772.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000		
3. Tanah Seluas 1091 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	870.000.000
1. MOBIL, PEUGEOT 3008 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. MOBIL, HYUNDAI IONIQ 5 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 770.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	977.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	3.459.817.859
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.959.350.923
F. HARTA LAINNYA	Rp.	215.000.000
Sub Total	Rp.	16.633.968.782
III. HUTANG	Rp.	312.932.427
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	16.321.036.355

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.